

REKONSILIASI SOSIAL : SATU KERANGKA ANALISIS DARI TEORI KONSENSUS

Ulber Silalahi¹

Abstract

This article discusses social reconciliation and consensus. The analysis covers social solidarity and collective awareness and how do they relate to modern society in general and Indonesian society in particular. The discussion on social reconciliation and consensus specifically focus on Indonesia's post new order era when to a certain extent anomie has existed.

Keywords: *consensus, social reconciliation*

PENGANTAR

Berbagai situasi yang muncul di dalam masyarakat dewasa ini terutama setelah runtuhnya Orde Baru menunjukkan adanya ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*) sehingga mengancam solidaritas sosial. Solidaritas masyarakat sedang terancam dengan timbulnya berbagai pertentangan, baik antar etnik, antar suku, antar ras, dan bahkan antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah pusat dan daerah, di kalangan elit politik dan pemerintahan maupun di tingkat *grass-root* baik di pusat maupun di daerah. Fenomena-fenomena tersebut dengan sangat jelas mewarnai kehidupan politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Indonesia era pasca Orde Baru yang tidak kondusif pada tingkat elit maupun masyarakat atau *grass-root*. Runtuhnya Orde Baru membawa perubahan sosial. Perubahan sosial bisa membuat guncangan menuju disintegrasi sosial. Johnson mengatakan :

Perubahan sosial yang pesat hampir selalu disertai munculnya ketegangan-ketegangan dan perpecahan-perpecahan dalam struktur sosial dan kesenjangan budaya (*cultural-lag*) serta diskontinuitas. Semua ini dialami sebagai masalah-masalah sosial di mana tradisi yang sudah mapan tidak menyediakan jawaban-jawaban yang siap pakai. Mencari jalan

¹ Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

keluar, kadang-kadang mengakibatkan orang mempertanyakan asumsi-asumsi tradisional dan menciptakan bentuk-bentuk baru. Tetapi bisa juga orang berusaha untuk membela asumsi-asumsi tradisional, dengan jalan menginterpretasikannya kembali, di mana artinya dapat disesuaikan dengan situasi yang baru. Bagaimanapun juga, banyak bentuk sosial atau budaya kehilangan kualitas yang jelas, yang nyata, di mana orang-orang menerima dan mengikutinya secara otomatis; sebaliknya, bentuk-bentuk itu menjadi sangat tidak pasti dan dapat diubah oleh orang-orang yang berbeda latarbelakang budaya atau subkulturnya (1986: 10-11).

Kecenderungan perubahan sosial pasca Orde Baru ialah terjadinya disintegrasi sosial dan politik menuju disintegrasi nasional. Itu terjadi karena solidaritas sosial dalam masyarakat Indonesia pasca Orde Baru telah “runtuh”. Keruntuhan solidaritas sosial mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam masyarakat dalam bernegara dan berpemerintahan yang mengarah ke disintegrasi politik dan disintegrasi sosial. Kerukunan antar umat beragama yang selama ini didengungkan dan dicoba diimplementasikan, misalnya, telah berantakan oleh pertentangan “antar umat beragama” seperti yang terjadi di Ambon dan Maluku. Perseteruan, pertikaian, saling menyalahkan dan bahkan balas dendam merupakan indikasi bahwa masyarakat Indonesia menuju ke situasi apa yang disebut oleh Durkheim sebagai “*anomie*”, sebuah kondisi manusiawi yang ditandai oleh tidak adanya peraturan sosial adalah tentang bentuk keadaan manusia yang tidak sosial, non-rasional dan tak berbentuk. Bilamana kekuatan-kekuatan moral kehidupan sosial ambruk, individu sama sekali berada di laut tanpa gagasan apa pun tentang tujuan apa yang harus dicapai atau bagaimana hidup secara memuaskan. Jadi, *anomie* adalah sebuah kondisi masyarakat di mana agama, pemerintah dan moralitas telah kehilangan keefektifannya dan keadaan psikologis yang diakibatkannya pada para individu kecewa tanpa tujuan hidup apa pun dan karenanya tak memiliki kebahagiaan tetap.

Apa yang terjadi di antara kekuatan bangsa yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat sebenarnya sudah membosankan masyarakat itu sendiri. Masyarakat berharap ada perdamaian antara mereka yang berseteru, tetapi perdamaian itu bukan perdamaian yang dipaksakan oleh elit penguasa, melainkan oleh mereka yang mengalami perseteruan ialah aktor-aktor penting di dalamnya melalui proses dialogis yang intensif hingga rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional menjadi harapan bangsa. Bagi Azyumardi Azra, pemaafan dan rekonsiliasi adalah langkah yang harus ditempuh bangsa Indonesia (Kompas, Sabtu, 10 Nopember 2002). Secara

etimologis, rekonsiliasi berasal dari bahasa latin dari kata *'reconciliatio'* dan kata kerjanya *'reconciliare'* yang berarti membawa kembali, membangun kembali, memperbaharui, merukunkan. Dalam bahasa keagamaan rekonsiliasi memiliki makna relasional untuk merefleksikan dosa, sesal, tobat, silih, ampun dan penyembuhan luka-luka batin. Rekonsiliasi digunakan dalam pengertian yang lebih bersifat individual: menjadi manusia baru dalam hubungan dengan diriku sendiri, sesama dan Tuhan. Kemudian berkembang dimana rekonsiliasi memiliki makna yang lebih kolektif menyangkut kehidupan bermasyarakat sebagaimana banyak dibicarakan sekarang ini. Karena itu rekonsiliasi memiliki matra (dimensi) sosial dan spiritual. Pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan dimensi sosial, sedangkan lembaga agama mengembangkan dimensi spiritual. Keduanya mempunyai jati diri masing-masing yang berbeda tetapi saling melengkapi ([http://wartamikael.org/wmview.php? ArtID=182](http://wartamikael.org/wmview.php?ArtID=182), Selasa, 02 Juli 2002).

Kejenuhan atas kekacauan sosial membuat tiap komponen bangsa menyerukan dilakukannya rekonsiliasi sosial. Peper ini mencoba melihat rekonsiliasi sosial dari perspektif teori konsensus.

SOLIDARITAS SOSIAL, KESADARAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS

Studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor sosiologi klasik dan para ahli teori sosiologi kontemporer. Pendekatan ini memiliki asal usul sosiologis dalam karya penemunya, Aguste Comte. Di dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa "masyarakat adalah laksana organisme hidup". Kemudian asumsi dasar sosiologi dari pemikiran kaum fungsionalis yang bermula dari Comte tersebut kemudian dilanjutkan oleh Spencer, yaitu bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Prancis bernama Emile Durkheim. Tom Campbell menempatkan teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim sebagai "Teori Konsensus" (Campbell, 1994: bab 7).

Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh

bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat "patologis". Suatu depresi yang parah dapat menghancurkan sistem politik, mengubah sistem keluarga dan menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan. Pukulan yang demikian terhadap sistem dilihat sebagai suatu keadaan patologis, yang akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sehingga dapat normal kembali dipertahankan. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai *equilibrium*, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedangkan keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial (Poloma, 1984: 25-26). Berfungsinya sejenis masyarakat tertentu secara normal secara standar diandaikan sebagai keadaannya yang layak dikehendaki secara moral. Secara umum segala sesuatu yang normal atau rata-rata untuk sebuah organisme sosial khusus dianggap sehat dan karenanya dapat diterima, sedangkan yang abnormal dan tidak biasa bersifat 'patologis' (Campbell: 1994: 171).

Jadi secara biologis dan sosiologis, dan bahkan berdasarkan agama, kehidupan manusia tidak lepas antara yang satu dengan yang lain. Satu sama lain saling tergantung. Individu-individu tidak bisa hidup dalam kesendirian dan keterpencilan selama-lamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat bertahan hidup dan untuk hidup sebagaimana dikodratkan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Itu mungkin karena masyarakat tempat kita hidup ini merupakan sebuah kebersamaan yang penting yang membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi tertentu, seperti jaminan material; karena ada kenyataan sosial yang lebih mendasar yang masuk ke dalam hakikat kita yang terdalam sebagai manusia. Seperti dikatakan oleh Aristoteles, bahwa manusia adalah seekor hewan sosial, yakni bahwa ia tak bisa hidup terus di luar sebuah kelompok sosial (Campbell, 1994: 6-7)

Manusia adalah makhluk sosial yang di antara mereka ada kesalingtergantungan. Ini berarti bahwa setiap bagian dari masyarakat adalah tergantung kepada bagian lain dari masyarakat. Sehingga apa yang terjadi pada satu tempat dalam masyarakat memiliki efek penting ke keseluruhan. Oleh sebab itu perubahan sosial yang kompleks dalam masyarakat juga diikuti oleh interdependensi yang juga semakin kompleks. Pemikiran seperti ini menghubungkan kehidupan masyarakat seperti kehidupan organisme. Auguste Comte, misalnya, sangat menerima saling ketergantungan yang harmonis antara "bagian-bagian" masyarakat, dan sumbangannya terhadap bertahannya stabilitas sosial. Meskipun keteraturan sosial dapat terancam oleh anarki sosial,

moral, dan intelektual, selalu akan diperkuat kembali. Konsensus terhadap kepercayaan-kepercayaan serta pandangan-pandangan dasar selalu merupakan dasar utama untuk solidaritas dalam masyarakat (Johnson, 1986: 89).

Solidaritas dan integrasi sosial penting dipahami, baik pada tingkatan masyarakat itu secara keseluruhan dan juga tingkatan kelompok atau organisasi. Solidaritas sosial dan integrasi merupakan permasalahan substantif dalam teori konsensus, sebagaimana dikembangkan oleh Durkheim. Solidaritas sosial adalah fakta sosial. Solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas merupakan hubungan antar individu didasarkan atas perasaan. Ikatan ini menurut Durkheim lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik merupakan dua tipe struktur sosial. Solidaritas mekanis menunjuk pada masyarakat di mana tiap individu dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Mereka merasa bersatu dan tidak ada pembagian kerja, dan tidak ada saling ketergantungan. Sebaliknya solidaritas organis menunjuk pada masyarakat ada pembagian kerja sehingga membuat orang atau tiap individu saling tergantung. Ada ketergantungan fungsional, saling memerlukan.

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif” dan gambaran kolektif. Kesadaran kolektif atau “suara hati kolektif” (*collective consciousness* atau *conscience collective*) menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Itu merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Sementara gambaran kolektif (*representations collective*) adalah simbol-simbol yang mempunyai makna yang sama bagi semua anggota sebuah kelompok dan memungkinkan mereka untuk merasa sama satu sama lain sebagai anggota-anggota kelompok. Gambaran kolektif tersebut memperlihatkan cara-cara anggota-anggota kelompok melihat diri mereka dalam hubungan-hubungan mereka dengan objek yang mempengaruhi mereka. Gambaran kolektif adalah bagian dari isi kesadaran

kolektif, sebuah entitas yang ada di antara sebuah pikiran kelompok yang bersifat metafisis dan kenyataan opini publik yang lebih prosais. Kesadaran kolektif mengandung semua gagasan yang dimiliki bersama oleh para anggota individual masyarakat dan yang menjadi tujuan-tujuan dan maksud-maksud kolektif. Durkheim mengatakan bahwa;

keseluruhan kepercayaan normatif yang dianut bersama dengan implikasi-implikasi untuk hubungan-hubungan sosial membentuk sebuah sistem tertentu dengan fungsi mengatur kehidupan dalam masyarakat dan karenanya menetapkan kesatuannya. Kesadaran kolektif, yang intensitas, kekakuan dan banyaknya berbeda-beda dari masyarakat ke masyarakat, adalah bagian hidup sadar para individu itu yang mereka miliki bersama berkenaan dengan kehidupan bersama mereka: kesadaran kolektif itu adalah sebuah konsensus normatif yang mencakup kepercayaan-kepercayaan keagamaan atau kepercayaan-kepercayaan lain yang menyokongnya, ... (Campbell, 1994: 179-180).

Kesadaran kolektif yang mendasari solidaritas mekanik paling kuat ditemukan dalam masyarakat tradisional yang sederhana dengan tingkat homogenitas yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini semua anggota pada dasarnya memiliki kepercayaan bersama, pandangan, nilai-nilai dan semuanya memiliki gaya hidup yang kira-kira sama. Homogenitas ini mungkin kalau kita melihat kenyataan bahwa pembagian kerja sangat rendah yang tidak menghasilkan heterogenitas sosial yang demikian tingginya sehingga cara berpikir dan bertindak yang sama benar-benar dirusakkan. Indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik menurut Durkheim adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan itu. Sementara ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas serupa itu hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim (Johnson, 1986: 183), seperti dalam masyarakat-masyarakat sederhana atau tradisional atau pedesaan. Secara institusional masyarakat-masyarakat sederhana terintegrasi secara ketat, dalam arti bahwa tak ada perbedaan yang tajam antara aturan-aturan dan tuntutan-tuntutan kehidupan keluarga, keagamaan, politis, moral dan legal. Semuanya sangat tradisional dan dikontrol secara ketat sehingga individu lahir ke dalam situasi-situasi sosial yang dirumuskan dengan jelas di mana kewajiban-kewajibannya persis, jelas dan tidak dapat dielakkan.

Tesis Durkheim adalah bahwa sifat rekat dari masyarakat-masyarakat sederhana macam itu didasarkan pada kesamaan dan kemampuan untuk saling menukarkan bagian-bagian mereka; 'solidaritas mekanis' ini berasal dari kesamaan hakiki para individu yang sama-sama memiliki sebuah kesadaran kolektif yang kuat dan definitif. Di dalam masyarakat

sederhana mayoritas gagasan-gagasan, sentimen-sentimen atau gambaran-gambaran yang lazim yang hadir dalam kesadaran satu orang juga hadir dalam kesadaran orang-orang lain, karena sebagian besar fenomena mental, atau apa yang disebut Durkheim fenomena 'moral', adalah bagian dari kesadaran kolektif. Akibatnya, adalah sulit membedakan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan seseorang satu sama lain dan tak ada ketegangan yang serius antara keinginan-keinginan individu dan pembatasan-pembatasan dari kelompok (Campbell, 1994: 182-183).

Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Karena pembagian kerja mulai meluas, kesadaran kolektif pelan-pelan mulai hilang di mana tiap orang merasa dirinya semakin berbeda dalam kepercayaan, pendapat, dan juga gaya hidup. Solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian kerja yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan (kepercayaan, pendapat, sikap) di kalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan di tingkat individu merombak kesadaran kolektif bersama yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Tetapi heterogenitas yang semakin bertambah dalam masyarakat tidak menghancurkan solidaritas sosial. Sebaliknya, karena pembagian kerja semakin tinggi, individu dan kelompok dalam masyarakat merasa menjadi semakin lebih tergantung satu sama lain daripada hanya mencukupi kebutuhannya sendiri.

Modern societies are characterized by "organic solidarity". A cohesion based on differentiation and interdependence. ... People are held together by their mutual interdependence, not by similarity. A society of organic solidarity encourages the formation of a more attenuated but also more complex collective consciousness/conscience (Garner, 201: 67).

Meningkatnya secara bertahap saling ketergantungan fungsional antara pelbagai bagian masyarakat yang heterogen itu memberikan suatu alternatif baru untuk kesadaran kolektif sebagai dasar solidaritas sosial (Johnson, 1986: 183).

Solidaritas organis yang berkembang dalam masyarakat-masyarakat kompleks berasal lebih dari kesalingtergantungan daripada dari kesamaan bagian-bagiannya. Perbedaan-perbedaan yang mendasari bentuk kesatuan baru ini tentu bersifat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan, karena setiap peran yang terspesialisasi penampilannya

tergantung pada kegiatan jenis-jenis orang yang saling berhubungan di dalam berbagai macam jabatan dan kegiatan, dan tak satupun yang berdiri lepas dari yang lain. Solidaritas organis, dengan demikian, adalah sebuah kesatuan dari sebuah keseluruhan yang bagian-bagiannya berbeda-beda namun berhubungan dengan cara sedemikian rupa sehingga masing-masing membantu mencapai tujuannya keseluruhan (Campbell, 1994: 185).

Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) daripada yang bersifat memaksa atau represif seperti dalam masyarakat dengan solidaritas organis. Tujuan dari hukum restitutif dan represif berbeda. Hukum represif mengungkapkan kemarahan kolektif yang dirasakan kuat. Meskipun demikian kejahatan dan sanksi-sanksi represif yang dihubungkan dengannya bersifat fungsional bagi masyarakat-masyarakat sederhana, bukan karena pembalasan dendam menyebabkan penangkalan dari penyerang-penyerang lain yang potensial, melainkan karena tindakan hukuman itu, dengan membiarkan kesadaran kolektif menyatakan dirinya, memperkuat kesadaran itu. Jadi fungsinya yang sebetulnya adalah memelihara keutuhan kohesi sosial, sementara memelihara semua vitalitasnya di dalam kesadaran bersama (Campbell, 1994: 183-184).

Hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara pelbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu sifat hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat berbeda dalam kedua hukum itu. Mengenai tipe sanksi yang bersifat restitutif, bukan bersifat balas dendam, melainkan sekedar "memulihkan keadaan" (Johnson, 1986: 184). Sanksi-sanksi restitutif mempunyai fungsi memperbaiki situasi-situasi yang diperoleh mendahului peristiwa pelanggaran hukum. Jadi hukum restitutif berlaku sebagai sebuah kerangka kerja untuk kegiatan-kegiatan kooperatif individu-individu yang merupakan ciri pokok masyarakat-masyarakat kompleks dengan solidaritas organis.

Kesadaran kolektif dalam suatu masyarakat organis menyumbang pada solidaritas sosial, memperkuat ikatan yang muncul dari saling ketergantungan fungsional yang semakin bertambah. Solidaritas organik tidak dengan sendirinya menghancurkan kesadaran kolektif, tetapi hanya mengurangi arti pentingnya dalam pengaturan terperinci dalam kini memberikan lebih banyak ruang untuk otonomi individu dan heterogenitas sosial, tetapi tidak

harus membuat individu menjadi terpisah sama sekali dari ikatan sosial yang didasarkan pada konsensus moral. Singkatnya, kesadaran kolektif itu memberikan dasar-dasar moral yang tidak bersifat kontraktual yang mendasari hubungan-hubungan kontraktual yang dijadikan sebagai dasar fundamental dari keteraturan sosial. Tetapi disadari bahwa individualisme semakin meningkat dalam masyarakat-masyarakat organik dan hidup individualisme akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Bagan 1:
Sifat-sifat pokok dari masyarakat dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian kerja rendah • Kesadaran kolektif kuat • Hukum represif dominan • Individualitas rendah • Konsensus terhadap pola-pola normatif penting • Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang • Saling ketergantungan relatif rendah • Bersifat primitif atau pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian kerja tinggi • Kesadaran kolektif lemah • Hukum restitutif dominan • Individualitas tinggi • Konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum penting • Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang • Saling ketergantungan relatif tinggi • Bersifat industrial-perkotaan

Sumber: Doyle Paul Johnson, 1986: 188.

KONSENSUS DAN REKONSILIASI

Kesalingtergantungan atau interdependensi (*interdependency*) antar individu dalam kehidupan kemasyarakatan menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajek dan kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan baik melalui pembagian kerja (*division of work*) untuk mewujudkan keteraturan sosial. Keteraturan sosial bergantung pada pembagian kerja dan kerjasama. Kesalingtergantungan tersebut terjadi karena tiap individu atau tiap bagian dari sistem sosial sebab mereka memberi atau memainkan beberapa fungsi sosial (*societal function*) dalam masyarakatnya, baik sebagai *manifest functions* atau fungsi-fungsi nyata dan *latent functions* atau fungsi-fungsi yang tersamar.

Fungsi merupakan konsekuensi-konsekuensi dari setiap kegiatan sosial yang tertuju pada adaptasi atau penyesuaian suatu struktur tertentu dari bagian-bagian komponennya. Dengan demikian fungsi menunjuk kepada proses dinamis yang terjadi di dalam struktur masyarakat. Masing-masing variasi elemen-elemen dari struktur masyarakat melaksanakan satu fungsi untuk masyarakat. Dengan kata lain, itu menemukan beberapa kebutuhan dalam masyarakat atau entah bagaimana kontribusi kepada operasi efektif dari masyarakat. Dalam konteks ini, kebutuhan harus dipenuhi agar sistem yang hidup termasuk sistem sosial tetap *survive*. Ciri-ciri kehidupan modern yang mencolok, seperti individualisme, otonomi, dan kesalingtergantungan, yang seringkali “menghancurkan solidaritas sosial” dan “integrasi sosial, sebenarnya dapat dipadukan di dalam sebuah cita-cita yang realistis maupun memuaskan secara manusiawi. Dalam kesalingtergantungan masyarakat, mereka membutuhkan konsensus dan kerjasama.

According to functionalists, societies tend toward consensus in order to achieve cooperation. As we have already seen, the interdependency in society requires that people cooperate. If people in even one part of such an interdependent system fail to cooperate with people elsewhere in the system, the effects will be felt through the entire system. People are more likely to cooperate when they share similar values and goals (John E. Farley, 1990: 61).

Kesalingtergantungan hanya mungkin terjadi jika di antara mereka terdapat konsensus (*consensus*) dan atas dasar konsensus tersebut akan memudahkan melakukan kerjasama atau kooperasi (*cooperation*). Masyarakat memiliki satu kecenderungan menuju konsensus; yaitu “*to have certain basic values that nearly everyone in the society agrees upon*” (Farley: 1990: 61). Misalnya, masyarakat modern sepakat bahwa mereka percaya dalam hal kebebasan

(*freedom*) dan demokrasi (*democracy*) dalam berpemerintahan. Masyarakat cenderung untuk konsensus dalam aturan untuk mencapai kerjasama atau kooperasi. Bentuk dan isi aturan-aturan sosial ini dan aturan-aturan sosial lainnya mencerminkan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial pada umumnya dan tuntutan-tuntutan khusus masyarakat-masyarakat yang mempunyai aturan-aturan itu. Interdependensi dalam masyarakat memerlukan kerjasama orang. Jika orang dalam tiap bagian dari tiap sistem interdependensi melakukan bersama dengan orang di lain tempat dalam sistem, efek akan menjadi seluruhnya dirasakan oleh sistem. Orang akan merasa lebih suka melakukan kerjasama ketika mereka membagi nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu. Dan menurut Durkheim, "*they share things in common with one another; he referred to such unity as solidarity*" (Farley, 1990: 61).

Bagaimanapun juga, konsensus dan kerjasama menjadi syarat untuk tiap orang dapat bergabung dengan orang lain. Tetapi kita dapat bergabung dengan orang lain untuk membuat pilihan-pilihan yang masuk akal mengenai soal-soal kepentingan bersama apabila kita memiliki kepercayaan-kepercayaan mengenai karakteristik hakiki dari kehidupan bersama dari suatu kelompok masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang bersifat tetap dapat didasarkan pada kepentingan. Tetapi di mana kepentingan adalah satu-satunya kekuatan yang berkuasa, masing-masing individu menyadari diri berada dalam keadaan perang dengan setiap individu lainnya karena tak ada apa pun yang dapat mengubah ego-ego dan tak ada gencatan senjata dalam antagonisme abadi ini yang tak akan berlangsung lama. Bagi Durkheim, persekutuan-persekutuan yang didasarkan pada kepentingan sama tidak stabilnya dengan kepentingan-kepentingan yang mendasari persekutuan-persekutuan itu: 'tak ada sesuatu yang kurang tetap daripada kepentingan. Dewasa ini kepentingan mempersatukan saya dengan anda: besok kepentingan akan membuat saya musuh anda (Campbell, 1994: 181).

Persoalannya, apa yang terjadi ketika satu masyarakat ketiadaan konsensus?. Menurut para fungsionalis, ketidakmampuan untuk kooperasi akan melumpuhkan masyarakat, dan orang akan lebih mencurahkan dan lebih berusaha untuk memperjuangkan sesuatu yang lain dari pada mendapatkan apasaja yang dilakukan. Contoh gamblang di Indonesia adalah tentang Maluku, suatu masyarakat yang kekurangan konsensus tentang beberapa nilai-nilai kunci sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang berdampak pada munculnya kerusuhan-kerusuhan. Tampaknya ada kecenderungan bahwa pengalaman-pengalaman kolektif yang semakin kuat

di masing-masing kelompok (Muslim dan Kristen) juga menyebabkan semakin rendahnya solidaritas sosial (atas dasar ikatan fakta sosial berupa norma-norma, nilai-nilai yang sama secara kultural) di antara mereka. Pengalaman kolektif yang kuat di masing-masing kelompok memunculkan apa yang disebut oleh Diurkheim sebagai “Ide tentang yang Suci”. Ide tentang yang suci mencerminkan atau berhubungan dengan sesuatu yang riil. Ide mengenai yang suci muncul dari kehidupan kelompok dan sebenarnya mewakili kenyataan kelompok itu dalam bentuk simbol. Individu-individu datang berkumpul pada kesempatan-kesempatan upacara atau ritus keagamaan dan melalui interaksi yang tinggi di antara mereka sembari memusatkan perhatian pada satu objek yang sama, sehingga ada suatu peningkatan emosional secara bertahap yang menjadi kuat dalam setiap orang karena kesadaran bahwa semua orang lain sedang ikut dalam pengalaman yang sama.

Masing-masing tindakan orang menyumbang pada pengalaman bersama, tetapi pengalaman kolektif keseluruhannya mengatasi setiap individu. Hasil akhir dari proses saling merangsang secara kolektif ini adalah terciptanya suatu situasi emosional di mana individu-individu kehilangan individualitasnya serta kontrol diri dan terhanyut dalam suatu jenis keadaan yang secara emosional “tinggi”. Ini akan memperkuat solidaritas sosial internal. Ritus agama mempersatukan individu dalam kegiatan bersama dengan satu tujuan bersama dan memperkuat kepercayaan, perasaan dan komitmen moral yang merupakan dasar struktur sosial bagi masyarakat yang menganut agama tersebut. Tetapi hal itu justru akan semakin membedakannya dengan dasar struktur sosial dari masyarakat yang menganut agama yang berbeda dengannya sehingga cenderung menciptakan solidaritas sosial yang rendah yang mengarah ke disintegrasi sosial. Konsensus di antara dua kelompok masyarakat yang bertikai perlu dilakukan untuk mendapatkan titik temu atau keseimbangan (*equilibrium*) melalui rekonsiliasi nasional. Tentang *equilibrium* sebagai satu prinsip dari teori fungsionalis dapat dijelaskan sebagai berikut:

This view holds that, once a society has achieved the form that is best adapted to its situation, it has reached a state of balance or equilibrium, and it will remain in that condition. New technology, a change in climate, or contact with an outside society are all conditions to which a society might have to adapt. When such conditions occur, social change will take place: society will change just enough to adapt to the new situation. However, once that adaptation has been made, the society has attained a new state of balance with its environment, and it will not change again until some new situations requires further adaptation. ... In short, the natural tendency of society is to be stable, because society is a smoothly operating, interdependent system (Farley, 1990: 62).

Upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat melalui rekonsiliasi harus dilandasi prinsip solidaritas dan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan demokratisasi dan menghapus perbedaan yang ada di masa lalu untuk melihat ke depan. Tetapi untuk sampai ke sana, semua wakil pihak, wakil masyarakat sipil dan militer dan dari berbagai kalangan yang berkuasa di masa lalu dan kini, terutama masyarakat yang mengalami konflik yang harus menyelesaikan konflik tersebut dengan melakukan dialog hingga rekonsiliasi, duduk dalam satu meja perundingan, duduk bersama dengan semangat keterbukaan akan kesalahan masa lalu dan semangat persahabatan dan menyepakati satu agenda (*agenda setting*) permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan di forum rekonsiliasi. Ini penting untuk menghindari terjadinya hal-hal di luar tujuan utama rekonsiliasi itu sendiri.

Bagaimanapun juga membangun solidaritas menjadi hal penting untuk rekonsiliasi nasional. Kalau masyarakat bisa memelihara solidaritas tersebut maka masyarakat akan seimbang dan dalam masyarakat demikian akan mudah mencapai konsensus. Parameter konsensus melihat ada bidang-bidang persetujuan atau konsensus yang luas atas dasar nilai-nilai dan bentuk-bentuk utama organisasi sosial. Kelangsungan setiap masyarakat memerlukan tingkat kesetiaan pada norma-norma bersama, tetapi hal ini tidak perlu diartikan sebagai konsensus dalam arti pengesahan yang diinginkan atas norma-norma yang bersangkutan. Konformitas bisa merupakan hasil dari sanksi-sanksi, entah sanksi fisik belaka yang diancamkan terhadap 'para pelanggar hukum' atau tekanan-trekanan yang lebih halus dari opini publik dan pemboikotan sosial. Dan, sudah barang tentu, 'sanksi' tuntutan ekonomislah yang menyebabkan banyak orang bertindak seakan-akan mereka memiliki nilai-nilai untuk mengontrol individu-individu atau kelompok-kelompok pada sebuah organisasi masyarakat. Teori-teori konflik menekankan unsur-unsur paksaan dan kekuasaan ini, sementara teori-teori konsensus condong mengandaikan bahwa pemakaian sanksi-sanksi hanya dapat bersifat perifer dalam pencapaian tatanan sosial (Campbell, 1994: 46).

Dengan demikian pemaksaan oleh pihak tertentu atau menggunakan 'kekuasaan' untuk melakukan rekonsiliasi nasional maupun rekonsiliasi lokal tidak akan mendapat hasil yang optimum. Menggunakan kekuasaan untuk membentuk opini, kepercayaan atau nilai-nilai hanya akan menghasilkan sebuah konsensus 'semu', atau sebatas konsensus sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kekuasaan. Otoritas (hak untuk menciptakan aturan-aturan dan menuntut kepatuhan) memang diperlukan untuk rekonsiliasi. Dan bila hak

ini didasarkan bukan pada ancaman sanksi, melainkan pada persetujuan yang dikehendaki dan diadakan dari para anggota sebuah masyarakat, otoritas dapat dikontraskan dengan kekuasaan. Pada keadaan paling ekstrim, teori-teori konsensus tidak begitu saja berpendapat bahwa 'hukum' yang dirumuskan sebagai aturan-aturan umum yang disokong dengan paksaan fisik tak bisa menjadi dasar tatanan sosial, tetapi bahwa kita akan melihat sistem-sistem legal pada dirinya dan norma-norma sosial non-legal *a fortiori*, sebagai sesuatu yang mengungkapkannya sebuah konsensus sosial yang kurang mementingkan pemakaian paksaan (Campbell, 1986: 48).

PENUTUP

Di era Orde Baru tampak peranan negara yang berlebihan dalam menjamin tatanan sosial. Tetapi ketika terjadi reformasi, maka tatanan-tatanan sosial yang ada diporakporandakan menjadi lebih didasarkan atas hubungan-hubungan yang bersifat kontraktual. Karena sifat kontraktual, maka ketika orang merasa tatanan sosial yang ada tidak menguntungkan dirinya, maka orang melepaskan ikatan dirinya dari tatanan sosial tersebut dan mencari yang lain, yaitu suatu konsepsi tatanan sosial yang memadai. Tetapi ketika mencari yang lain, tindakan manusia ditentukan oleh nafsu dan ketamakan yang mewujudkan diri dalam situasi konflik yang keras (Poloma, 1984: 9). Itu terjadi karena kecenderungan manusia mementingkan diri sendiri. Masyarakat tidak mampu lagi merintangi nafsu manusia dan walaupun ada usaha untuk merintangi nafsu manusia tetapi hasilnya bukan mensosialisasikan mereka pada kepatuhan, melainkan melahirkan konflik yang berkepanjangan.

Situasi sosial Indonesia pasca Orde Baru merupakan indikasi bahwa masyarakat Indonesia berada pada situasi apa yang disebut oleh Durkheim sebagai "*anomie*", sebuah kondisi manusiawi yang ditandai oleh tidak adanya peraturan sosial. Anomie adalah sebuah kondisi masyarakat di mana agama, pemerintah dan moralitas telah kehilangan keefektifannya dan keadaan psikologis yang diakibatkannya pada para individu kecewa tanpa tujuan hidup apapun dan karenanya tak memiliki kebahagiaan tetap. Bila manusia kehilangan rasa memiliki sebuah kelompok dan kehilangan persentuhannya dengan bentuk yang diberikan kelompoknya pada hidup mereka, mereka kehilangan jati dirinya sendiri, perasaan akan kedudukan mereka, komitmen mereka pada yang mereka percayai sebagai kegiatan-kegiatan yang berharga dan dengan demikian kehilangan setiap harapan yang realistis akan kehidupan

yang bermakna. Inilah kondisi *anomie* yang terungkap dalam kekacaubalauan perubahan sosial dan ketidakbahagiaan akibat individualisme anarkhis yang tidak tertib (Campbell, 1994: 176-177).

Di dalam analisis Durkheim tentang tatanan sosial, dia mengandaikan bahwa bilamana kekuatan-kekuatan moral kehidupan sosial ambruk, individu sama sekali berada di laut tanpa gagasan apapun tentang tujuan apa yang harus dicapai atau bagaimana hidup secara memuaskan. Demikian juga penjelasan Durkheim mengenai konsekuensi-konsekuensi psikologis dari disintegrasi sosial yang terjadi dalam peralihan ke masyarakat industri modern mengandaikan bahwa tak ada pembatasan-pembatasan alamiah apapun pada kebutuhan-kebutuhan dan hasrat-hasrat manusia. Hanya manusia memiliki kemampuan tertentu untuk meraih apa yang mereka inginkan, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk memelihara keinginan-keinginan mereka dalam batas-batas yang dapat ditangani. Akibat dari situasi ini maka terjadilah situasi "*freedom in chaos*" seperti dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Ini terjadi karena lemahnya atau tiadanya kontrol dari kelompok sosial dan institusi sosial, seperti negara atau pemerintah, sehingga kehidupan individual manusia menjadi gelora nafsu tak terkendali dan tak terpuaskan yang mengakibatkan 'penyakit aspirasi tak terbatas' menyerupai individu hedonistis. Hasilnya adalah keresahan, kekecewaan dan kesia-siaan.

Masyarakat agraris dan perilaku yang masih didominasi oleh budaya-budaya tradisional, seperti halnya Indonesia, biasanya memiliki tingkat solidaritas yang tinggi dan lebih mengutamakan integrasi dan harmoni daripada konflik. Artinya, ada konsensus yang luas atas dasar nilai-nilai dan bentuk-bentuk utama organisasi sosial. Atas dasar nilai-nilai kultural dan bentuk-bentuk utama organisasi sosial yang mengandung solidaritas dan harmoni, maka kesepakatan sosial dan konsensus sesungguhnya akan mudah diwujudkan. Konsensus, khususnya konsensus mengenai nilai hidup manusia diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan kelangsungan hidup masyarakat. Usaha-usaha pemulihan ketidakseimbangan sosial yang melanda Indonesia membutuhkan rekonsiliasi sosial dari tingkat elit hingga tingkat akar rumput. Dan rekonsiliasi nasional hanya akan terwujud jika bukan bersifat balas dendam, melainkan sekedar memulihkan keadaan. Dari segi agama, etika, budaya dan politik sikap saling memberi dan menerima dalam konteks "Islah" merupakan keharusan yang tak terelakkan bagi terwujudnya rekonsiliasi sepanjang kesemuanya dilakukan dengan sepenuh hati, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab (Republika Online, 2002).

Daftar Pustaka

- Doyle Paul Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, diindonesiakan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Irving M. Zeitlin. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, penerjemah Anshori dan Juanda. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- John E. Farley. 1990. *Sociology*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Michael Haralambos with Robin Heald. 1989. *Sociology: Themes and Perspectives*. London: Unwin Hyman.
- Margaret M. Poloma. 1984. *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah YASOGAMA. Jakarta: Rajawali.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*, terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, edisi ke enam. Jakarta: Erlangga.
- Randall Collins. 1994. *Four Sociological Traditions*, revised and expanded edition of Three Sociological Traditions. Oxford: Oxford University.
- Roberta Garner, ed. 2000. *Social Theory: Continuity and Confrontation*. Toronto: Broadview Press.

Web site :

<http://wartamikael.org/wmview.php?ArtID=182>, Selasa, 02 Juli 2002.

Media massa :

Kompas, Senin 26 Oktober 1998.

Kompas, Rabu 06 Februari 2002.

Kompas, Selasa, 24 April 2001.

Kompas, Kamis, 9 Mei 2002.

Kompas, Sabtu, 10 Nopember 2002.

Suara Pembaruan, 11-2-2002.